



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA**

**NOTULENSI FORUM PENYESUAIAN UNTUK FINALISASI RANCANGAN
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2025-2029**

Hari, tanggal : Jumat, 15 Agustus 2025

Pukul : 13.00 WIB s.d 16.00

Tempat : Hybrid - *Zoom Meeting* dan Ruang Rapat 1 Coworking Space, Menara Bappenas Lt.1

Pemimpin Rapat : Direktur Kemandirian Sosial dan Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan perencanaan Pembangunan Nasional

Peserta:

1. Kepala Bagian Manajemen Kinerja;
2. Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan;
3. Direktorat Pengawasan Bidang Sosial dan Pelindungan Pekerja Migran, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kelompok Hukum, Biro Hukum, Organisasi dan Persidangan.

A. PEMAPARAN KEMENKO PM

1. Kemenko PM berperan dalam 4 misi agenda Pembangunan RPJPN, 2 Prioritas Nasional RPJMN yang menjadi mandat langsung dan Percepatan melalui 3 Strategi dalam Inpres 8/2025.
2. 4 Fokus SKP yakni (i) Basis Data Terpadu; (ii) Perlindungan Sosial dan Layanan Dasar Inklusif; (iii) Program Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat; (iv) Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu
3. Visi dari Kemenko PM: Lembaga Koordinator yang Efektif Sinkronisasi dan Koordinasi, serta Pengendalian Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045;

4. Indikator Tujuan Kemenko PM 2025 -2029 :
 - (i) Terwujudnya pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dan berkesinambungan dengan indikator: Proporsi PDB Ekonomi Kreatif, Proporsi penduduk kelas menengah, tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
 - (ii) Proporsi penduduk kelas menengah dengan indikator: Evaluasi Reformasi Birokrasi KPM.
5. Sasaran Strategis berupa:
 - (i) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup serta Kemandirian Sosial dan Ekonomi Masyarakat melalui penguatan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dengan arah kebijakan Peningkatan efektivitas dan keberlanjutan pemberdayaan Masyarakat;
 - (ii) Terwujudnya Tata Kelola kelembagaan yang didukung oleh aparatur yang profesional, inovatif, dan berintegritas, dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan kualitas proses penyusunan perumusan dan penetapan kebijakan;
 - b. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan.
6. Roadmap Transformasi Strategis PM 2025-2029:
 - (i) 2025: Penyeragaman Arah dan Fondasi Kebijakan
 - (ii) 2026: Penguatan Sinergi dan Konvergensi Program
 - (iii) 2027: Peningkatan Kapasitas dan Ketepatan Pendekatan
 - (iv) 2028: Replikasi Model Inklusif Berbasis Wilayah
 - (v) 2029: Konsolidasi Keberlanjutan dan Transisi Strategis
7. Tantangan MRPN Kemenko PM:
 - (i) Geopolitik dan Geoekonomi serta Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Angka Kemiskinan;
 - (ii) Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat dan Ketidakpastian Pasar Kerja;
 - (iii) Stagnansi Penurunan Angka Kemiskinan;
 - (iv) Ketimpangan Pembangunan
8. Peluang:
 - (i) Digitalisasi dan Teknologi dalam Aspek Pemberdayaan Masyarakat sebagai Pendorong Inklusi Ekonomi;
 - (ii) Ekonomi Berbasis Komunitas dan Pemberdayaan UMKM dalam Mendorong Kelas Menengah Baru;
 - (iii) Potensi Pekerja Migran Indonesia di Pasar Kerja Global;
 - (iv) Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional Melalui Revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 - (v) Pemanfaatan Capaian Program Perlindungan Sosial untuk Penguatan Kemandirian Masyarakat;
 - (vi) Penguatan Kapasitas Pendamping sebagai Jembatan antara Program dan Masyarakat.

B. DISKUSI RAPAT

1. Direktorat Kemandirian Sosial dan Ekonomi Bappenas menyampaikan hal-hal yang masih perlu dipertajam: Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) maupun intervensi yang merupakan program-program teknis, misal: Pemberian modal atau pelaksanaan peningkatan kapasitas, masih perlu diperinci.
2. Unit kerja KemenPANRB memaparkan bahwa masih ditemukan ketidaksinkronan antara indikator tujuan dan indikator sasaran pada Renstra Kemenko PM. Beberapa indikator kinerja pada level Kemenko harus berorientasi hasil sesuai levelnya.
3. Ukuran/indikator kinerja pada level Kemenko atas fungsi sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian.
4. Sistematisasi penyusunan dokumen renstra agar disesuaikan dengan amanat Perpres 80 Tahun 2025.
5. Ekspektasi untuk menghasilkan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian dari triwulan 1-3 agar ada kesiapan rekomendasi kebijakan dengan outputnya.
6. Manajemen atau perilaku risiko yang baik adalah perlakuan yang memiliki lini masa pelaksanaan, meskipun dalam tabel tidak terlihat pelaksanaannya kapan, dan dalam program penurunan stagnansi agar menarik ekosistem graduasi.
7. Kementerian Keuangan menyampaikan Kemenko PM dalam menyusun rencana kerja, mengidentifikasi indikasi risiko dan membuat rekomendasi harus sesuai fungsi dan tugasnya yang diamanahkan dalam peraturan agar tidak tumpang tindih dengan unit yang berkaitan, terutama dalam topik kemiskinan.
8. Berkaitan dengan DTSEN untuk disesuaikan dengan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2025 tentang DTSEN agar tidak tumpang tindih pula dengan K/L lain yang memiliki tanggungjawab yang tersebut.

C. TINDAK LANJUT

- Diupayakan finalisasi draft RPermenko Rencana Strategis Kemenko PM sudah disesuaikan dengan saran dan hasil pada rapat ini, agar segera dikeluarkannya surat persetujuan dari Bappenas dengan target akhir bulan Agustus, dan masuk tahap selanjutnya yaitu harmonisasi.